

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya UU No. 22/1999 yang diperbarui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Sejak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan

(*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik, paling tidak terdapat tiga permasalahan utama mengapa *good governance* masih jauh dari kenyataan. Salah satunya yaitu belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Tidak adanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan mengendalikan internal pemerintah daerah. Hal tersebut dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem akuntansinya tidak memadai maka suatu barang tentu sistem pencatatan dan pelaporannya kurang handal. Salah satu penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, *efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable* maka Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah memfasilitasi pemerintah dengan aplikasi SIMDA dengan harapan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan (Septarini dan Papilaya 2016).

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Triandhini (2018) mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendelegasian kewenangan ini disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Pujanira dan Taman 2017). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik,

dengan menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh *output* yang dihasilkan darimasing-masing *subsystem* yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Yusup 2016). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010:297).

Pemerintah Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi

informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Data keuangan Organisasi Pemerintah Daerah, perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor melatar belakangi dikembangkannya suatu sistem informasi yang bersifat komputer. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan pada organisasi Pemerintah Daerah maka dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA keuangan. Aplikasi SIMDA telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai sistem informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dan barang milik daerah. Dan sejak diterapkan dapat dilihat adanya kemajuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Namun demikian, masih terdapat salah satu penyebab terjadinya perangkapan tugas dan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIMDA keuangan Veybie Komaling (2013).

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah ditingkat SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada Pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi client,server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Namun menurut (Devi 2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi Pemda secara maksimal.

Hal yang paling mendasar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan selalu berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Mengacu dengan amanat UU No.17 tahun 2013 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. PP no71 tahun 2010 merupakan pedoman dalam proses penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat ditingkatkan.

Egit Gunandi (2017) yang melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa menemukan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Sedangkan Dewi (2018) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Pariaman menemukan bahwa pada umumnya pegawai memiliki memahami pengertian SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya terkait dengan data masukan dan keluaran. Kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi SIMDA *Finance* ini SIMDA cepat kedaluwarsa, jaringan *offline* sering, tidak ada dokumentasi tentang diagram alur ringkasan yang menunjukkan data arus kas, sistem manajemen data yang lemah, prosedur untuk melihat data *insidental* masih terlalu lama, ruangan kantor yang masih kurang memadai serta terjadinya *human error*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan konsep yang erat hubungannya dengan konsep Sistem Informasi Manajemen Daerah. Serta dapat menjadi salah-satu sumber referensi dalam pengembangan teori untuk penelitian dengan tema dan cakupan masalah yang sama.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi pemerintah daerah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai masukan pada pemerintah sebagai pedoman kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Bagi akademik dan masyarakat sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah secara informasi dalam menunjang penelitian di masa yang akan datang. Khususnya dalam masalah Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah.
3. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis. Khususnya mengenai Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, serta untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) manajemen.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan

mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian ini secara khusus dilakukan di Pemerintah Kabupaten Luwu dan diarahkan untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Manajemen

2.1.1 Definisi Sistem

Sistem dalam suatu institusi pemerintahan sangatlah penting, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Terdapat berbagai pendapat yang mendefinisikan definisi sistem, seperti di bawah ini: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu” (Mulia 2019).

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Definisi sistem juga dapat dijelaskan oleh Jogiyanto dalam bukunya Analisis dan Desain sistem informasi, menerangkan: “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu” (Mulia, 2019).

Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem yang dituju. Secara umum sistem informasi di definisikan sebagai berikut: “Sekumpulan hal atau kegiatan atau

elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan (Pujanira dan Taman, 2017)

2.1.2 Definisi Informasi

Informasi merupakan data yang telah diproses sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan Data itu sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan. Pengertian informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang.” (Gunadi, 2017)

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

2.2 Tugas dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen

2.2.1 Tugas Sistem Informasi Manajemen

a. Pengumpulan Data

Bagian pengumpul data bertugas untuk mengumpulkan data baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pihak dalam perusahaan yang menjalankan tugas ini diambil dari seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga setiap unit kerja terwakili dalam SIM

b. Penyimpanan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya disimpan untuk segera diproses atau ditunda pemrosesannya, tergantung kebutuhan para manajer.

c. Pemrosesan Data

Pemrosesan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa ahli. Bila datanya terlalu banyak, jasa dari tenaga-tenaga pengumpul dan insidental dapat dimanfaatkan, bagian inilah yang membuat data itu berubah bentuk menjadi informasi yang disesuaikan dengan permintaan manajer.

d. Pemrograman Data

Setiap komputer memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Agar computer dapat melaksanakan tugasnya, maka perintah-perintah terhadap data yang terkumpul harus diubah terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang digunakan. Pekerjaan inilah yang disebut memprogram, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang komputer.

2.2.2 Fungsi Sistem Informasi Manajemen

- a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi.
- b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
- g. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- h. Mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.
- i. Mengolah dokumen-dokumen transaksi yang terjadi.

2.3 Manfaat dan Kualitas Informasi

2.3.1 Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut (Alfiani, 2017) adalah:

a. Menambah Pengetahuan

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

b. Mengurangi Ketidakpastian Pemakai Informasi

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.

c. Mengurangi Resiko Kegagalan

Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

d. Mengurangi Keanekaragaman yang tidak diperlukan

Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.

e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2.3.2 Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Triandhini (2018) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam karakteristik, yaitu :

a. Akurasi (*Accuracy*)

b. Ketepatan Waktu (*Timelines*)

- c. Relevan (*Relevance*)
- d. Agregasi (*Agregacy*)
- e. Pemformatan (*formatting*)

Mulia (2019) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (*uniqueness*), ketepatan (*conciseness*), kejelasan (*clarity*) dan keterbacaan (*read ability*).

2.4 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Teknologi informasi adalah suatu yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi computer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislatif dapat menggunakan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan

dialog publik dalam perumusan kebijakan. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya Darman Syarif (2015).

Menurut Djaja (2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.4.1 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem Informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/lembaga/ sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah.
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

2.4.2 Output Yang Dihasilkan

Output yang dihasilkan SIMDA keuangan adalah :

- a. Penganggaran
- b. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- c. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
- d. Surat Penyediaan Dana (SPD)
- e. Penatausahaan
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- g. Surat Perintah Membayar (SPM)
- h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- i. Surat Tanda Setoran (STS)
- j. Register
- k. Surat Pengendalian lainnya
- l. Akuntansi dan Pelaporan
- m. Jurnal
- n. Buku Besar
- o. Buku Pembantu
- p. Laporan Realisasi Anggaran
- q. Laporan Arus Kas
- r. Neraca

2.5 Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
- b. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
- e. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) audit.

2.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang disediakan oleh perusahaan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan alokasi modal dengan perusahaan yang bersangkutan (Maulia, 2014). Dalam standar akuntansi keuangan (SAK) (2009:2) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus kas dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Sulandri, 2016).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Rudini, 2018). Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Satuan organisasi dilingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Yusup, 2016).

Beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan tersebut yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, Laporan Keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30, UU No.17/2013 tentang keuangan negara meliputi laporan realisasi APBN/D, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Defenisi kualitas menurut Eliana (2017) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sedangkan menurut Ikriyati (2019) defenisi laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 adalah digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan manajemen yaitu membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan laporan keuangan sangat penting bagi pada organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Kriteria tersebut diatas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara Eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan penggunaan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	(Qomah 2021)	Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Studi ini memberikan bukti bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kata
2	(Hendri 2020)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya	X1: Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan: kualitas sumber daya manusia,

		Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X2: Sistem Informasi Manajemen Daerah X3: Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan		penerapan sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3	(Ikriyati dan Aprilia 2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat) Rizki	X1: Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat didapat Thitung dimana 3,249 dengan signifikansi 0,002 dimana $0,002 < 0,05$. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Inter terhadap dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat didapat Thitung dimana 4,524 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.
4	(Yanto dan Akfir 2019)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan)	X: Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Y: Sistem Informasi	Kuantitatif	Dengan skala pengukuran menggunakan data ordinal, nilai rata-rata tertimbang menunjukkan bahwa kualitas informasi saat sesudah/setelah menerapkan SIMDA

			Manajemen Keuangan Daerah		Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup lebih baik dari sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata tertimbang sesudah menggunakan SIMDA Keuangan sebesar 3,45 satuan, sedangkan sebelum menggunakan SIMDA Keuangan sebesar 2,00 satuan.
5	(Dewi dan Mariska 2018)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman	X: Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Y: Sistem Informasi Manajemen Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai telah memahami pengertian SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya terkait data input dan output. Kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi SIMDA Keuangan ini SIMDA cepat kadaluarsa, jaringan sering offline, tidak ada dokumentasi tentang rangkuman flow chart yang menampilkan data cash flow, sistem pengelolaan data yang lemah, prosedur untuk melihat data insidental masih terlalu lama, space masih minimnya perkantoran serta terjadinya human error.
6	(Pasi, 2018)	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akruah pada Pemerintah	X: Impelementasi Sistem Informasi Manajen Daerah Y: Sistem Informasi	Kuantitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akruah sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya

		Kebupaten Dairi Implementation	Manajemen Daerah		dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual.
7	(Pujanira and Taman 2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy	X1: Kompetensi SDM X2: Standar Akuntansi Pemerintah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan t hitung = 8,049 dan $r^2_{x1y} = 0,388$, (2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan t hitung = 6,071 dan $r^2_{x2y} = 0,265$, (3) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan t hitung = 5,949 dan $r^2_{x3y} = 0,258$, (4) Kompetensi

					Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY ditunjukkan dengan persamaan regresi, $F_{hitung} = 23,133$ dan $R^2_{y(1,2,3)} = 0,410$. Kata
8	(Eliana 2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	X: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai determinasi sebesar 25,6% yang menjelaskan bahwa dalam model regresi ini sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dinas pendidikan Aceh sebesar 25,6% dan sisanya sebesar 74,4% dijelaskan oleh variabel lain. hasil pengujian thitung dapat nilai 2,818 dimana ttabel 2,068, sehingga thitung $2,818 > 2,068$ tabel dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas

					laporan keuangan, yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.
9	(Ulfiati, 2017)	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian pada Pemerintah Kabupaten Tegal)	X1 : SIMDA X2 : Kualitas SDM X3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	adap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, 2)kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, 3)penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal.
10	(Simanjuntak, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Karo	X1 : SIMDA Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Karo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (penerapan SIMDA) terhadap variabel dependen (kualitas

					laporan keuangan) sebesar 24,7% sedangkan sisanya sebesar 75,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
--	--	--	--	--	--

2.9 Kerangka Konseptual

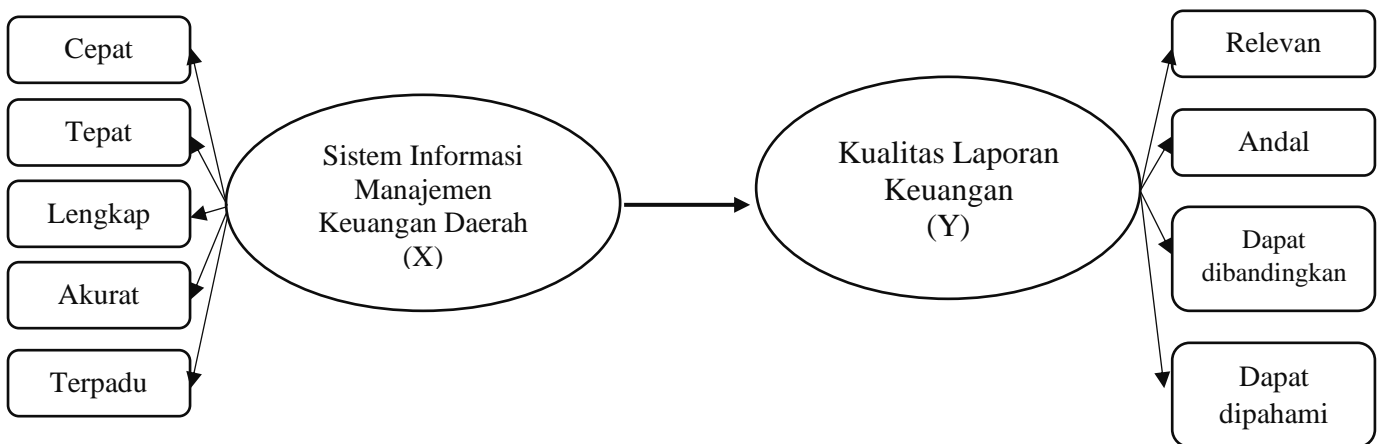
Sesuai dengan amanat PP. No 56 Tahun 2005 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pemeangunan) merancang SIMDA Keuangan untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Menurut PP. No 71 Tahun 2010 tentang SAP mengenai kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa indikator laporan keuanganyang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintah yang baik yaitu meliputi keempat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

PP. No 56 Tahun dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan mengandung arti yaitu sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan

pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi khususnya pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara sesuai rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat.

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawabannya.

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian.

Dengan demikian, untuk hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁ : Diduga bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Definisi metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2016: 11) adalah: “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu pada 17 September – 08 Oktober 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono:30, 2017). Populasi pada

penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Luwu.

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2017: 61) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang digunakan adalah pegawai pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pegawai atau staf bagian keuangan atau akuntansi dan menggunakan aplikasi SIMDA dalam penyusunan laporan keuangan

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (Angket penelitian) kepada objek yang akan diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Hasil penelitian yang baik dibutuhkan data yang benar-benar valid sehingga analisis yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mendapatkan data yang digunakan maka diperlukan adanya :

1. Penyebaran Kuesioner, dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun secara terstruktur kepada para karyawan Kantor Dinas Kabupaten Luwu.
2. Melakukan Observasi, yaitu dengan meninjau langsung tentang perilaku responden, pelaksanaan penerapan kebijakan pada Kantor Dinas Kabupaten Luwu

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Menurut Ferdinand (2006: 42) kuesioner menghasilkan data primer, dimana data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Daftar pertanyaan dalam kuesioner ini harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan memperoleh data berkaitan dengan kepuasan kerja dan motivasi kerja serta memperoleh data yang berkaitan dengan kinerja. Menurut Sugiyono (2010: 45) skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert 1-5 dengan penjelasan sebagai berikut:

- **STS** : Sangat tidak setuju skor 1
- **TS** : Tidak setuju skor 2
- **R** : Ragu-ragu 3
- **S** : Setuju skor 4
- **SS** : Sangat setuju skor 5

3.6 Defenisi Operasional Penelitian

3.6.1 Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (X)

SIMDA Keuangan adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja komputer.

Aplikasi SIMDA dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya Darman Syarif (2015).

3.6.2 Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas Laporan Keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang sesuai dengan standar dan diukur dengan berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (X)	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat • Tepat • Lengkap • Akurat • Terpadu 	<i>Likertr</i>
2	Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Relevan • Andal • Dapat dibandingkan 	<i>Likertr</i>

		• Dapat dipahami	
--	--	------------------	--

3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validasi

Validitas berasal dari kata *validity* dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Menurut Ghazali (2012) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji validitas menggunakan rumus *The Product Moment Coefficient correlation* yaitu dengan melihat r_{hitung} dan nilai signifikan/probabilitas masing-masing item pertanyaan dibandingkan dengan tingkat signifikan 5 %.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata *reliability* yang berarti sesuatu yang dapat dipercaya. Menurut Ghazali (2012) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrumen pengukuran digunakan prosedur *Cronbach's Alpha* yaitu 0,05.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi pada penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Persamaan regresi sederhana dengan satu predictor menurut Sugiyono (2016: 188) dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

X : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

3.8.2 Uji T

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika t hitung > t table, dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jika t hitung < t table,

dan $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Taraf signifikan = 5 %. Derajat kebebasan (df) = $n - 3$.

3.9 Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen Variasi Variabel Dependent dapat dijelaskan oleh Variasi Variabel Independent. Nilai R^2 ini terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R^2 mendekati 0, berarti sedikit sekali Variasi Variable Dependen yang diterangkan oleh Variable Independen. Jika nilai R^2 bergerak mendekati 1 berarti semakin besar Variasi Variable Dependent yang dapat diterangkan oleh Variable Independen jika ternyata dalam perhitungan nilai R^2 sama dengan 0 maka ini menunjukkan bahwa Variable Dependent tidak bisa dijelaskan oleh Variable Independent.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu

4.4.1 Profil Kabupaten Luwu

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2017 yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

4.4.2 Visi dan Misi Kabupaten Luwu

1. Visi

Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

- a. Maju : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- b. Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- c. Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

2. Misi

- a. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- e. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius.
- g. Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- i. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik.
- j. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir (*corrected item total correlation*) dan nilainya dapat dilihat pada hasil pengolahan menggunakan program SPSS 22 pada tabel item-total statistik di kolom *corrected item-total correlation*. Suatu pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r hitung yang merupakan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari r tabel. Kuisioner yang dinyatakan valid

berarti kuisioner tersebut benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur. Butir-butir instrumen dianggap valid apabila koefisien korelasi (r hitung) $>$ r tabel/ r kritis (0,30) (Sugiyono, 2016). Hasil uji validitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Hasil Uj Validitas

No	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	SIMDA (X)			
	1. Komputer yang dipakai untuk pengimputan data memadai	0,433	0,30	Valid
	2. Tidak ada kendala pada komputer yang tersedia	0,715	0,30	Valid
	3. Terdapat aplikasi pada komputer yang digunakan untuk menjalankan SIMDA Keuangan	0,561	0,30	Valid
	4. Adanya Software yang mendukung aplikasi SIMDA Keuangan tersebut	0,627	0,30	Valid
	5. Software yang digunakan standar nasional Indonesia	0,699	0,30	Valid
	6. Adanya jaringan internet memudahkan dalam menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut	0,715	0,30	Valid
	7. Jaringan internet yang sangat cepat dalam melakukan pengimputan data data keuangan	0,712	0,30	Valid
	8. Adanya pelatihan sebelumnya tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut	0,715	0,30	Valid
	9. Pelaporan yang tepat waktu dengan aplikasi SIMDA Keuangan	0,541	0,30	Valid
2	Kualitas Laporan Keuangan (Y)			
	1. Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap	0,687	0,30	Valid

	2. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut	0,727	0,30	Valid
	3. Pengolahan data dapat melakukan prosedur akuntansi dengan benar dan cermat	0,575	0,30	Valid
	4. Data dapat diubah bila terjadi kesalahan	0,752	0,30	Valid
	5. Pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar	0,821	0,30	Valid
	6. Laporan Keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami oleh pengguna	0,708	0,30	Valid
	7. Laporan keuangan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	0,451	0,30	Valid
	8. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan laporan instansi lain yang sejenis	0,821	0,30	Valid
	9. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah, apabila dilakukan pengujian atau verifikasi hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang diterbitkan	0,627	0,30	Valid
	10. Laporan keuangan yang dihasilkan diterbitkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu	0,726	0,30	Valid

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 9 item pertanyaan untuk variable SIMDA dinyatakan valid karena nilai r hitung dilihat dari *corrected item total correlation* lebih besar dibanding r tabel 0,30 seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono 2016). Dimana item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Sedangkan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan yang terdiri atas 10 item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai *corrected item total correlation* lebih besar dibanding 0,30 dan item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara One Shot atau sekali pengukuran saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (Ghozali, 2013:4). Suatu variabel dikatakan realibel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 (Algifari, 2015:97). Hasil pengujian realibilitas untuk masing-masing variabel diringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	SIMDA (X1)	9	0,965	Sangat baik
2	Kualitas Laporan Keuangan (X2)	10	0.961	Sangat baik

Sumber : Data diolah 2021

Tabel 4.2 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas SIMDA sebesar 0,965 dan kualitas laporan keuangan 0,961. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.3 Karakteristik Responden

4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis kelamin seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Penyajian data primer responden berdasarkan jenis kelamin yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki – laki	28	70
2	Perempuan	12	30
Jumlah		40	100

Sumber : Data diolah 2021

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 28 orang atau 70,0 % dan sisanya adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 12 orang atau 30,0 %. Responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak menguasai SIMDA

(Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin perempuan pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Luwu.

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Penyajian data responden berdasarkan Usia yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	21-26	10	25,0
2	26-30	13	32,5
3	31-35	12	30,0
4	35>	5	12,5
Jumlah		40	100

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa untuk umur responden yang terbanyak adalah umur 26-30 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 32,5 %. Untuk urutan ke dua diikuti dengan usia responden 31-35 tahun sebanyak 12 orang atau 30,0 %. Untuk urutan ketiga adalah umur 21-26 tahun sebanyak 10 orang atau 25,0%. Dan urutan paling terakhir adalah umur >35 tahun yang berjumlah 5 orang atau 12,5%.

4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Penyajian data responden berdasarkan pendidikan terakhir yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SMA	6	15,0
2	D3	16	40,0
3	S1	18	45,0
Jumlah		40	100

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan data bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok responden yang berpendidikan S1 yaitu 18 orang atau 45,0% dan SMA sebanyak 6 orang atau 15,0% hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Pemerintahan Kabupaten Luwu sebagian besar memiliki pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan responden maka semakin tinggi kemampuannya dan semakin tinggi kemungkinan keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugas pelaporan keuangannya dengan menggunakan SIMDA Keuangan . Dan responden yang berpendidikan D3 sebanyak 17 orang atau 40,0%.

4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Penyajian data responden berdasarkan masa kerja yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	1	4	10,0
2	2-3	18	45,0
3	3-5	14	35,0

4	>6	4	10,0
---	----	---	------

Sumber : Data diolah 2012

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa lama bekerja pegawai pada Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu terkait pada penelitian ini yang terbanyak adalah 2-3 tahun dengan jumlah 18 orang atau 45,0% dan 1 tahun sebanyak 4 orang atau 10,0%. Kemudian diikuti lama bekerja 3-5 tahun sebanyak 14 orang atau 35,0% dan yang terakhir masa kerja lebih dari 6 tahun sebanyak 4 orang atau 10,0%, hal ini disebabkan karena didasarkan bahwa pegawai yang telah lama bekerja menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja

4.4 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 40 responden melalui penyebaran kuesioner, untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana pada lampiran.

4.4.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Berdasarkan data yang diperoleh dari pegawai melalui kuesioner yang telah ditentukan, diperoleh deskripsi data mengenai pelatihan secara umum sebagai berikut :

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai SIMDA

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Total (%)
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Komputer yang dipakai untuk pengimputan data memadai	5	9	21	3	2	100

2	Tidak ada kendala pada komputer yang tersedia	8	18	7	4	3	100
3	Terdapat aplikasi pada komputer yang digunakan untuk menjalankan SIMDA Keuangan	5	19	14	2	-	100
4	Adanya Software yang mendukung aplikasi SIMDA Keuangan tersebut	14	12	12	1	1	100
5	Software yang digunakan standar nasional Indonesia	2	17	15	6	-	100
6	Adanya jaringan internet memudahkan dalam menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut	8	18	7	4	3	100
7	Jaringan internet yang sangat cepat dalam melakukan pengimputan data data keuangan	3	16	15	6	-	100
8	Adanya pelatihan sebelumnya tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut	8	18	7	4	3	100
9	Pelaporan yang tepat waktu dengan aplikasi SIMDA Keuangan	14	12	11	1	2	100

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan (X) terdiri dari 9 item pernyataan diantaranya yaitu, komputer yang dipakai untuk mengimput data memadai (X.P1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 5 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 9 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 21 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Tidak ada kendala pada komputer yang tersedia (X.P2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 18 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 7 responden, jawaban tidak setuju

(TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 3 responden.

Terdapat aplikasi pada komputer yang digunakan untuk menjalankan SIMDA Keuangan (X.P3) yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 5 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 19 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 14 responden, jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Adanya software yang mendukung aplikasi SIMDA Keuangan tersebut (X.P4) yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 14 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 12 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 12 responden, dan yang memilih jawaban tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) sebanyak masing-masing 1 responden.

Aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan standar nasional Indonesia (X.P5), yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 2 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 17 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 15 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 6 responden dan yang memilih jawab sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Adanya jaringan internet yang memudahkan menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan (X.P6) yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 18 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 7 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 4 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 3 responden.

Jaringan internet sangat cepat dalam melakukan pengimputan data-data keuangan (X.P7) yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 3 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 16 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 15 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 6 responden dan tidak ada yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS).

Adanya pelatihan sebelumnya tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut (X.P8) yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 18 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 7 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 4 responden dan yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 3 responden.

Pelaporan yang tepat waktu dengan aplikasi SIMDA Keuangan (X.P9) yang memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 14 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 12 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 11 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

4.4.2 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pegawai melalui kuesioner yang telah ditentukan, diperoleh deskripsi data mengenai pelatihan secara umum sebagai berikut :

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Total (%)
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap	8	18	7	5	2	100

2	Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut	15	12	11	1	1	
3	Pengolahan data dapat melakukan prosedur akuntansi dengan benar dan cermat	7	10	16	6	1	
4	Data dapat diubah bila terjadi kesalahan	10	18	11	-	1	
5	Pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar	8	17	10	3	2	
6	Laporan Keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami oleh pengguna	5	9	21	3	2	
7	Laporan keuangan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	2	17	15	6	-	
8	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan laporan instansi lain yang sejenis	8	17	11	2	2	
9	Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah, apabila dilakukan pengujian atau verifikasi hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang diterbitkan	8	11	13	8	-	
10	Laporan keuangan yang dihasilkan diterbitkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu	5	19	14	2	-	

Berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) terdiri dari 10 item pernyataan diantaranya yaitu, data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap (Y.P1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 18 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 7 orang, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 5 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai analisis laporan keuangan lanjutan (Y.P2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 15 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 12 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 11 responden. Jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Pengolahan data dapat melakukan prosedur akuntansi dengan benar dan cermat (Y.P3) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 7 responden, jawaban setuju sebanyak (S) 10 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 16 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 6 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Data dapat diubah bila terjadi kesalahan (Y.P4) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 10 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 18 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 11 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden dan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 responden.

Pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar (Y.P5) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 17 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 10 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi secara jelas dan dapat dipahami oleh penggunanya (Y.P6) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 5 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 9 responden, jawaban ragu-

ragu (RR) sebanyak 21 responden jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Laporan keuangan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Y.P7) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 2 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 17 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 15 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 6 responden, dan tidak ada yang memilih jawaban sangat tidak setuju (STS).

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan laporan instansi lain yang sejenis (Y.P8) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, memilih jawaban setuju (S) sebanyak 17 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 11 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2 responden.

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah apabila dilakukan pengujian atau verifikasi hasilnya tidak jauh beda dengan yang diterbitkan (Y.P9) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 8 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 11 responden, jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 13 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 8 responden dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden.

Laporan keuangan yang dihasilkan diterbitkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu (Y.P10), memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 5 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 19 responden,

jawaban ragu-ragu (RR) sebanyak 14 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden.

4.5 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negative.

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Sederhan

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.522	5.626		6.136	.000
	SIMDA	.049	.169	.047	.289	.774

a. Dependent Variable: Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah 2021

Dari tabel diatas, adapun persamaan regresinya :

$$Y = a + \beta X + e$$

$$Y = 5.626 + 0.049X$$

1. Nilai konstanta dari persamaan diatas sebesar 5,626. Artinya apabila variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan = 0 maka pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 5,626.
2. Sistem Informasi Manajemen (Keuangan) Daerah (X) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,049, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada variabel

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sebesar 1% maka Kualitas Laporan Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,049.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji T

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dimana pada penelitian ini untuk melihat pengaruh SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Luwu secara parsial/individual.

Tabel 4.10 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(constant) SIMDA	7,661 ,476	13,297 ,234	,253	,576 2,033	,568 ,000

a. Dependent Variable: KualitasLaporanKeuangan

Sumber : Data diolah

Hipotesis : Diduga SIMDA berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Luwu

Hasil uji Hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.10, variabel Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA) mempunyai tingkat signifikansi sebesar

0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMDA berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel SIMDA lebih kecil dari 0,05

4.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.715	.708	3.60364

a. Predictors: (Constant), SIMDAkeuangan

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.12 besarnya nilai koefisien R Square adalah 0.715, hal ini berarti 71,5% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) sedangkan sisanya ($100\% - 71,5\% = 28,5\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka akan dilakukan pembahasan yang memberikan beberapa informasi secara rinci tentang hasil penelitian serta bagaimana pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan(X), sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y). Pengujian hipotesis antar variabel independen dan variabel dependen dilakukan melalui hasil analisis SPSS 21. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis : Pengaruh Penerapan Sistem Informaasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada persamaan ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. Hal ini ditunjukkan dengan uji *coefisien^a* atau uji T dimana variabel Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMDA berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel SIMDA lebih kecil dari 0,05. Kualitas Laporan Keuangan atau dapat dikatakan bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawabannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan telah selesainya penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi, dengan model penelitian yang berbeda dan pada objek yang berbeda. Misalnya pada dinas lain ataupun pada perusahaan sehingga dapat dilihat perbedaannya. Selain itu, sebaiknya penelitian berikutnya menggunakan jumlah responden yang lebih banyak agar hasil perhitungannya lebih akurat, dengan menggunakan atau menambahkan variabel lain untuk diteliti serta didukung oleh teori-teori atau penelitian terbaru.

5.2.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi lain yang tertarik untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan

data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan seperti yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini yang turut mendukung penerapan SIMDA Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfiani, Nur. 2017. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal) Disusun." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 87(1,2): 149–200.
- Dewi. 2018. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3(1): 63–70.
- Eliana. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh)." *KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis* 8(1): 1–14.
- Gunadi, Egit. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*: 76–78.
- Hendri, Meisy, and Erinoss NR. 2020. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1): 2479–93.
- Ikriyati, Tri, and Nila Aprila. 2019. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma." *Jurnal Akuntansi* 9(2): 131–40.
- Mulia, Rizki Afri. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten

- Pasaman Barat).” *Jurnal EL-RIYASAH* 9(1): 7.
- Pasi, Novlentina, Abdul Kadir, and Isnaini Isnaini. 2018. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.” *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 7(1): 49.
- Pujanira, Putriasri, and Abdullah Taman. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6(2).
- Qomah, Siti. 2021. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8(1): 95.
- Rudini, Ahmad. 2018. “Analisa Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penerimaan Penyerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur.” *E-Jurnal Profit (Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan)* 3(1): 1–9.
- Septarini, Dina Fitri, and Frans Papilaya. 2016. “Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 7(2): 100–116.
- Sulandri, Dwi. 2016. “Analisis Faktor-Faktor Implementasi Sistem Informasi Pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Bantul).” *Repository Universitas PGRI*.
- Triandhini, M. 2018. “Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/69190>.

- Yanto, Edi, and Akfir. 2019. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)." *Strategic Manajemen* 3(1): 44–59. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm>DOI:<https://doi.org/10.25134/ijsm.v3i1.2819>.
- Yusup, Maulana. 2016. "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* 10(2): 149–60.